

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TENTANG PENAMBANGAN PASIR LAUT  
DI PEKON MANDIRI SEJATI KECAMATAN KRUI SELATAN  
(Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**EKA SHAPUTRA JAYA**

**NPM : 1621020366**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H /2020 M**

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TENTANG PENAMBANGAN PASIR LAUT  
DI DESA MANDIRI SEJATI KECAMATAN KRUI SELATAN  
(Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**Eka Shaputra Jaya  
NPM : 1621020366**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Penambangan pasir laut merupakan suatu cara atau proses kegiatan pengambilan yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan pasir dengan cara mengali sungai dan laut sehingga menimbulkan dampak yang luas bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya, yang mana sebagai sumber kemakmuran yang tidak diragukan lagi, bahwa sektor ini menyokong pendapatan masyarakat. Dalam prosedur penambangan pasir laut di desa Mandiri Sejati yang di jalankan oleh masyarakat tidak ada izin dari Instansi terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan) maupun Pemerintahan Desa. Namun masyarakat terus melakukan aktivitas penambangan dan tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi dengan adanya penambangan tersebut. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat juga mempunyai kelemahan dalam mengatasi dampak penambangan pasir laut di Desa Mandiri sejati, yaitu kurang ditegakannya peraturan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintahan desa, dan tidak adanya sanksi untuk penambangan yang melanggar peraturan pemerintahan desa, sehingga penambang dengan bebas melakukan aktivitas penambangan.

Rumusan masalah dari judul Skripsi ini adalah Bagaimana Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi penambangan Pasir laut di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat? Dan Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang penambangan pasir laut di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi penambangan pasir laut di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat? Dan bagaimana pandangan fiqh siyasah mengenai penambangan pasir laut di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Metode Penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis, yaitu memaparkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan fola pikir induktif dan atau deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat mempunyai kelemahan dalam mengatasi kebijakan penambangan pasir laut di Desa Mandiri sejati, yaitu kurang ditegakannya peraturan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintahan desa, dan tidak adanya sanksi untuk penambangan yang melanggar peraturan pemerintahan desa, sehingga penambang dengan bebas melakukan aktivitas penambangan, Maka masyarakat dipekon Mandiri sejati selaku penambangan, menganggap bahwa kegiatan penambangan pasir merupakan salah satu kegiatan yang tidak melanggar hukum dan menghasilkan peluang ekonomi yang lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya. Peran Pemerintahan daerah dalam mengatasi Penambangan pasir di Pekon Mandiri Sejati Kecamatan Pesisir Selatan, dilihat dari pandangan fiqh siyasah, peran pemerintahan daerah tidak memenuhi ciri-ciri hak dan kewajiban sebagai *Uliil Amri*, selain itu adapun hak rakyat secara umum nya, setiap warga negara harus diberi semua hak yang telah ditetapkan dalam hukum islam, hak persamaan, hak kebebasan,

hak menuntut ilmu, dan hak memperoleh tanggungan dari negara. Namun ada hal yang menjadi kendala dalam kebijakan maupun pengawasan dan penindakan yang disebabkan oleh Permasalahan mendasar dalam pengaturan regulasi penambangan pasir dilihat dari sisi pemegang kebijakan yaitu pemerintahan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sisi internal pemerintahan daerah itu sendiri serta sisi eksternal pemerintahan daerah.



## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Eka Shaputra Jaya

NPM : 1621020366

Jurusan /Prodi : Siyasah Syar'iiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwas kipsi yang berjudul **“Analisis Fiqih Siyasah Tentang Penambangan Pasir Laut Di Desa Mandiri Sejati Kecamatan Krui Selatan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat)”** asalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam katya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Bandar Lampung, Juli 2020



**Eka shaputra jaya**  
**NPM 1621020366**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260**

**PERSETUJUAN**


**Judul Skripsi : ANALISIS FIQIH SIYASAH TENTANG PENAMBANGAN  
PASIR LAUT DI DESA MANDIRI SEJATI KECAMATAN  
KRUI SELATAN (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama : Eka Shaputra Jaya  
NPM : 1621020366  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Hj. Zuhra'ni, S.H., M.H.**  
**NIP. 196505271992032002**

**Pembimbing II**

  
**Arif Fikri, S.H., M.Ag**

**Ketua Jurusan**

  
**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721)703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS FIQH TENTANG PENAMBANGAN PASIR LAUT DI DESA MANDIRI SEJATI KECAMATAN KRUI SELATAN** (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat). Disusun Oleh **Eka Shaputra Jaya NPM 1621020366** Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang Munasqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 05 Oktober 2020.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Jayusman, M.Ag.**

**Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H**

**Penguji Utama : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.**

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.**

**Penguji II : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag.**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Khairuddin, M.H  
196210221993031002**

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Qs. Al-A’raf: 56)





## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillahilahirabbil'alamin dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan rasa terima kasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Yang terhormat, Kedua orang tua ku, Ayahanda tercinta Munadi yang selalu berjuang demi cita-cita dan mimpi anak-anaknya, Ibunda tersayang Cik Neli yang begitu luar biasa cinta kasih dan do'anya, yang takkan berhenti mendukung dan memotivasi anak-anaknya.
2. Yang tercinta, Kakak ku Annisa shafitri, Adik-adik ku Fatah Abdul Hakim, Muhammad Ramadhan, Muthiah Nabilah, dan Febri Shiatul Sholeha, yang turut memberikan dukungan dan motivasi serta memberi keceriaan dalam keluarga.
3. Teman-teman seperjuang Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016, KKN, PPS, Keluarga besar Kontrakan No Mak Sifa.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Eka Shaputra Jaya, dilahirkan di Gunung Kemala pada tanggal 05 September 1996, anak kedua dari enam bersaudara, Lahir dari pasangan Bapak Munadi dan Ibu Cik Neli. Pendidikan dimulai dari TK Aisyah di pasar Ulu Krui dan selesai pada tahun 2002, Kemudian melanjutkan sekolah dasar MIN 1 Pesisir Barat dan selesai pada tahun 2008. setelah itu melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS NU Pesisir Tengah dan selesai pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMK N 1 Pesisir Tengah dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dimulai pada semester 1 pada tahun akademik 2016.

Selama menjadi mahasiswa, saya aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2020  
Yang Membuat

**Eka Shaputra Jaya**  
**NPM 1621020366**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, pengetahuan, kesahatan dan hidayah-nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Penambangan Pasir Laut (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat) dapat diselesaikan Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, guna memperoleh penyelesaian skripsi. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksanakan tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

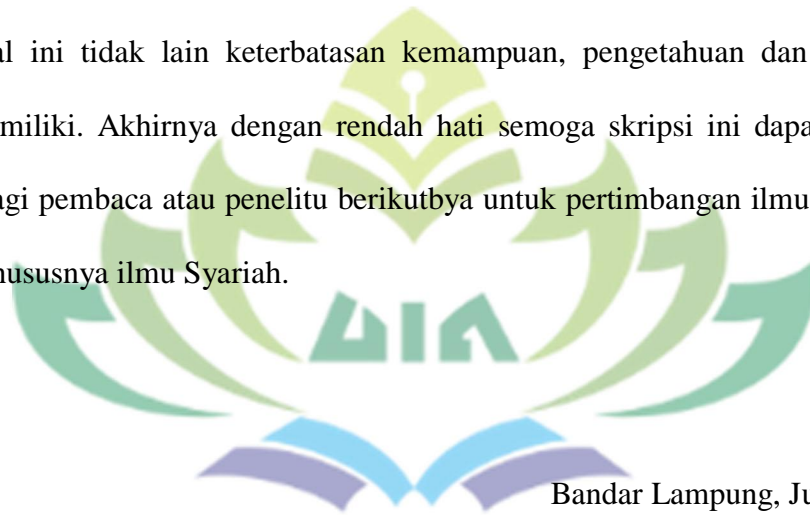
1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Frenki, M.Si, selaku ketua jurusan Dan Sekretaris Jurusan Hervin Yoki Pradikta, M.H.i, yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.



4. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H M.H, selaku pembimbing sejak penulis tercatat sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Sekaligus pembimbing 1 yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Arif Fikri, S.H. M.Ag selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan ini dapat terselesaikan.
6. Bapak, Ibu dosen dan Bapak Dr. Jayusman, M.Ag., Bapak Drs. Susiadi AS, M.Sos,I. Selaku penguji skripsi serta karyawan pada Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi, Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah, serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Pemerintahan Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan penjelasan mengenai data-data tersebut.
8. Kepala pekon Mandiri Sejati dan masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini.
9. Sahabat terbaik PMII Rayon Syariah angkatan 2016, Ariyansyah, Nando, uyung dedi, panda, ayu, Pido, Tiara, Widya, dan pasukan sanak Krui , Fitri, Eni, Revi, Elisa, buyung Reki, Dapri, Ardian, sarmada, Bowo, dayat, modon, Eka iswanda, Irfan Dayat.

10. Rekan-rekan seperjuangan Kelas Siyasah D, sekali lagi terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari keluarga ku di bangku kuliah dari awal hingga saat ini.
11. Serta keluarga kedua Bujang krui, dek Ilyas, cik Beno, dang Sup, dang Tomi, dang Rizki, dang Boy, Kak Bu, Bos Endi, odo Ucok, odo Eriko, dang Imam, dang kiki, mamak dio, bungkeng, dang yudis, terimakasih banyak puary-puary ku atas jasa-jasa kalian yang tak terhitung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan rendah hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Syariah.



Bandar Lampung, Juli 2020

**Eka Shaputa Jaya**  
**NPM. 1621020366**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikansi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Fiqh Siyasah.....	16
1. Dasar Hukum Fiqh Siyasah.....	19
2. Pengertian Ulil Amri .....	25
3. Hak Dan Kewajiban Ulil Amri / Penguasa .....	34
4. Hak Dan Kewajiban Rakyat .....	39
5. Hubungan Penguasa Dan Rakyat .....	44
B. Penambangan Pasir laut .....	48
1. Tujuan Dan Fungsi Penambangan Pasir .....	49
2. Jenis Penambangan Pasir .....	50
C. Tinjauan Pustaka .....	53

## BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN



A. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat .....	56
1. Geografis .....	56
2. Demografis .....	57
3. Monografis .....	59
B. Pembagian Wilayah dan Jumlah Penduduk .....	61
1. Pembagian Wilayah .....	61
2. Jumlah Penduduk .....	62
C. Deskripsi Data Penambangan Pasir Laut .....	64
D. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Terkait Penambangan Pasir Laut .....	68
E. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mengatasi Penambangan Pasir laut.....	70

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

1. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Mengatasi Penambangan Pasir Laut di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	73
2. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Mengatasi Penambangan Pasir Laut .....	75

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Rekomendasi.....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas yaitu “Analisis Fiqih Siyasah Tentang Penambangan Pasir Laut” (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat). Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ( sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Fiqih siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 275.

<sup>2</sup> H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 1.

3. Penambangan ialah merupakan salah satu kegiatan dasar yang dilakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian yang oleh karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari suatu kehidupan atau peradapan manusia. Pertambangan juga dapat disebut juga sebagai suatu kegiatan yang unik, hal ini disebabkan karena endapan bahan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata didalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun karekteristiknya dari bahan galian tambang tersebut.<sup>3</sup>
4. Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan a dan golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa maksud dari penulis didalam proposal skripsi ini adalah meneliti tentang Penambangan pasir laut yang akan dilakukan penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih menentukan judul tersebut adalah :

### **1. Alasan Objektif**

Bahwa permasalahan penambangan pasir laut di tetapkan zona dilarang melakukan penambangan pasir yang telah ditetapkan dalam surat

---

<sup>3</sup>Salim HS , 2014 *Hukum pertambangan mineral dan batubara*, Jakarta, sinar grafika , h.11.

<sup>4</sup>Kementerian kelautan dan Perikanan “*Pengelolaan ruang laut*”. (On-line), tersedia di : <http://kkp.go.id > djprl > page//>, h. 94. ( 20 November 2019).



keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan fakta di lapangan masih saja di temukan praktek penambang pasir di pesisir pantai Kabupaten Pesisir Barat.

## 2. Alasan subjektif

- a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas di fakultas syariah di jurusan siyasah.
- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini sesuai dengan jurusan yang penulis pelajari yaitu di program studi siyasah.

## C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan sehingga memiliki wilayah laut yang luas, Negara yang memiliki laut yang luas tentu saja mempunyai wilayah pesisir pantai yang cukup banyak dan beragam oleh karena itu Indonesia menjadi Negara dengan wilayah pesisir pantai yang terkenal keindahannya. Keindahan pesisir pantai di Indonesia terbukti dengan banyaknya wisatawan lokal bahkan asing yang berkunjung ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam pantainya.<sup>5</sup> Keindahan alam yang tidak ternilai harganya itu perlu dijaga agar tidak rusak, Keindahan pantai pesisir di Indonesia menjadi hal yang sangat berharga karena tidak semua Negara mempunyai keindahan yang mempesona seperti Indonesia sehingga sudah semestinya keindahan tersebut dija-

---

<sup>5</sup>Safri Burhanudin, *Sejarah Maritim Indonesia*, (Jakarta: Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Non Hayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 2003), h. 1.

ga.<sup>6</sup> Salah satunya tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga wilayah pesisir pantai yaitu dengan membuat Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil. Adanya peraturan diharapkan kelestarian wilayah pesisir pantai dapat terlindungi.<sup>7</sup>

Kekayaan alam di Indonesia dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, salah satunya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah potensi pertambangan, banyak bahan tambang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tidak heran jika banyak ditemukannya penambang di pesisir pantai Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki potensi sumber daya berupa pasir laut. Pada dasarnya bahan galian atau tambang di kelola oleh Negara untuk kemakmuran rakyat, dan sesuai dengan isi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaannya seharusnya pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor swasta apabila diperlukan.<sup>8</sup>

Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu, lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan, waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun) resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi persiapan

---

<sup>6</sup>I Gede Pitana, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009), h. 32.

<sup>7</sup>Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 81.

<sup>8</sup>Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 33 Ayat (3)

sebelum penambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumber daya mineral pada umumnya di daerah pedalaman maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor.<sup>9</sup> Menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2007 direvisi dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Pasal 35 tentang dilarang melakukan penambangan pasir, jika dapat merusak ekosistem perairan. Pasal 35 ayat (i), melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitarnya.<sup>10</sup> Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 15 setiap orang atau badan dilarang melakukan pengalihan atau pengerukan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan disekitar lokasi penggalian dan pengerukan.<sup>11</sup>

Meskipun sudah ada peraturan masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, Salah satunya adalah penambangan pasir laut di Pantai Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Pasir merupakan material bumi yang banyak kegunaannya, khususnya untuk bahan bangunan, karena itu pasir banyak dicari oleh masyarakat yang berada di pesisir pantai dengan

---

<sup>9</sup>Gatot supramono, *hukum pertambangan mineral dan batabara di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 3.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penambangan Pasir, Pasal 35 ayat(i).

<sup>11</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pasal 15.



menggunakan mobil pick up dengan harga permobil bisa mencapai Rp 50.000 bahkan lebih tergantung muatan mobil.

Aktivitas pertambangan pasir laut tersebut pada umumnya belum menerapkan konsep pengelolaan dan pengawasan yang baik dari pemerintah atau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, merugikan masyarakat sekitarnya, aktivitas pertambangan pasir laut ini menghasilkan dampak positif dan negatif, menurut salah satu sopir mobil pengangkut pasir seperti rusaknya prasarana jalan akibat kendaraan pengangkut pasir yang melewati pemukiman warga, tidak hanya itu lahan-lahan bekas galian dibiarkan begitu saja sehingga bisa menimbulkan kerusakan yang cukup parah seperti terbentuknya lubang-lubang dan tumpukan pasir pada kawasan penambangan, kemudian dilihat dari segi sosial terjadi perubahan perilaku masyarakat setempat menjadi lahan pekerjaan yang baru dan membantu perekonomian masyarakat, namun disisi lain juga berdampak negatif pada lokasi penambangan dan masyarakat setempat.<sup>12</sup>

Fiqh Siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan hubungan pemimpin dengan disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkupnya pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* dari segi persesuaian dengan Prinsip-

---

<sup>12</sup>.Munadi Mz, Wawancara dengan sopir mobil pengangkut pasir , Pesisir Barat, 12 Oktober 2019.

prinsip agama dan merupakan realisasi kemashalatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Disisi lain *Fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat dilihat dari bidang *siyasah tasri'iyah* termasuk didalam persoalan *ahlul hadi wal aqli* ,perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.<sup>13</sup>

Dari semua penjelasan diatas pemerintah daerah perlu keterlibatan, sangat diharapkan melakukan pengelolaan dan pengawasan serta mengatasi penambangan pasir laut yang dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Karena penambangan pasir laut illegal yang belum mempunyai izin pertambangan sama halnya melanggar Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Latar Belakang ini penulis tertarik dan optimis untuk melakukan penelitian dengan Judul “Analisis Fiqih Siyasah Tentang Penambangan Pasir Laut (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupten Pesisir Barat)”.

#### **D. Fokus penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan subansi materi kajian penelitian yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar peneliti dapat terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan. Sehingga penelitian akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yaitu mengenai penambangan pasir laut.

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas

---

<sup>13</sup> Sayyid Abdul A'la al-maududi. *The Islamic Law and Constitution*, (Pakistan: Islamic Publications Ltd. 13-E Shah Alam Market, Lahore, 1967), h. 58.

kedalam identifikasi masalah. Jadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana penyelesaian yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai Penambangan pasir dilaut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007 dan direvisi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Pasal 35 ayat (i), dan melihat analisis fiqih siyasah terhadap penambangan pasir laut studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat secara mendalam.

#### **E. Rumusan masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi penambangan Pasir laut di Desa Mandiri Sejati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah tentang Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi penambangan pasir laut di Desa Mandiri Sejati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi masalah penambangan pasir laut di Desa Mandiri Sejati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Untuk mengetahui Analisis Fiqih Siyasah tentang Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi penambangan pasir laut di Desa Mandiri Sejati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

#### **G. Signifikansi penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadikan referensi atau badan untuk diskusi bagi mahasiswa fakultas syariah , maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan fiqh siyasah
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **H. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah: suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.<sup>14</sup>

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

- a. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>15</sup> Data diperoleh dengan penelitian survey yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-

---

<sup>14</sup>Joko suvbago, *Metode Penelitian Palam Teori dan Praktik* ( Jakarta: PT .Rinneka cipta, 1994).

<sup>15</sup>Susiadi, *metode penelitian* (lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 12.

gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara factual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun satu daerah.

Dalam penelitian biasanya dilakukan untuk mengevaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Penelitian ini dapat dilakukan dalam sejumlah individu atau unit.<sup>16</sup> Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses, yang sedang berlangsung.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>18</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h.14.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 16.

<sup>18</sup>Suharsimi Arit kumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.



penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dari interview dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, kepala desa, masyarakat umum, pengelola pertambangan, penambang pasir.

- b. Data Sekunder adalah data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap, Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitanya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruangan pustaka yaitu buku-buku, lapora hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>19</sup>

Observasi menurut Kartini Karttono adalah “studi sengaja dan sistematis fenomenal sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. Sedangkan Karl Weick, mendefinisikan observasi sebagai “penelitian, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku

---

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 148.

dan suasana yang berkenaan dengan organisme tertentu, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>20</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Dalam wawancara ini harus mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*).<sup>21</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Metode ini menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

4. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, yang terdiri dari manusia,

---

<sup>20</sup> Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 83.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h. 173.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 202.

benda dan peristiwa sumber data yang mempunyai karakteristik dalam sebuah penelitian.<sup>23</sup>

#### b. Sampel

Sampel adalah contoh referensi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.<sup>24</sup> Tujuan peneliti mengambil sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan tujuan hanya mengamati sebagian dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sample yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Propesive sampling* yaitu berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri atau sifat tertentu yang atau dilihat populasi dijadikan kunci untuk pengambilam sampel. Maka agar penelitian tersebut benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian.<sup>25</sup> Sample yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat (1), Kepala Desa (1), masyarakat umum (2), pengelola pertambangan (1), Penambang Pasir (1), Maka jumlah keseluruhan sampel yang diambil berjumlah 6 orang.

#### 5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam dalam memproses data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 130.

<sup>24</sup> Kartini kartono, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 148.

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 134.

yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data (*Reconsructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis, sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian di tarik kesimpulan sebagai tahap akhir proses peneltian.<sup>26</sup>
- c. Sistematis data (*Systematizing*) yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, mengelompokan data secara sistematis yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif<sup>27</sup>

## 6. Analisis Data

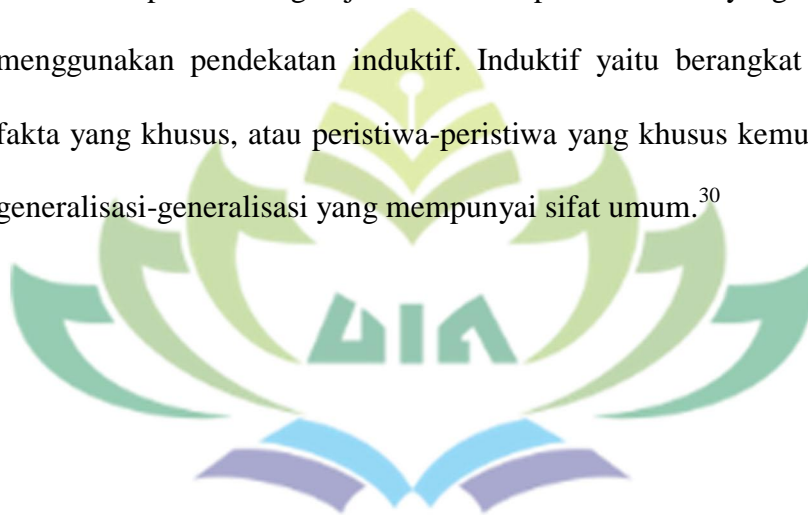
Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisis data tersebut, adapun metode analisis data yang dipergunakan metode analisis data, kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi

---

<sup>26</sup>Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

<sup>27</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (BandarLampung; PT Citra Aditya Bakti,2004), h. 120.

yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.<sup>28</sup> Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan se jelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>29</sup> Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>30</sup>



## BAB II

---

<sup>28</sup>Syaipan Djambat, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), h. 78.

<sup>29</sup>Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.34.

<sup>30</sup>Suharsimi AriKunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.



## LANDASAN TEORI

### A. Pengertian fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tafkib idhafi* atau kalimat majmuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara etimologi, Fiqh merupakan bentuk *musdhar* dan *tashrifan* kata *faqih* *yaqqahu-fiqhan* yang berarti pemahanan yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>31</sup> Apabila digabungkan menjadi kedua kata *fiqh* dan *Al-siyasi* maka *Siyasah Syari'yyah* ialah pengurus hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemasalahatan dan penolakan kemudaratatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang *kulliy*, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.<sup>32</sup> Sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu, pihak yang mengatur dan pihak yang di atur. Dilihat dari unsur-unsur yang terlihat dalam proses fiqh siyasah, maka ilmu ini mirip dengan ilmu politik.

Dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang bersifat eksekutif dan unsur masyarakat, akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya fiqh siyasah berbeda dengan politik.

---

<sup>31</sup> Ibn Manzhur, *lisan al-Arab*, juz 6 (Beirut: Dar al-shadr, 1968), h. 108.

<sup>32</sup> Abd Wahab al-Khalaf, *Al-Siyasah Wa al-Syariah*, (Kairo: Dar Anshor, 1997), h. 15

Menurut Ali Syariati, *fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarah (*ishlah*), sebaliknya politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan bukan pengarahan.<sup>33</sup>

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis Siyasah, yaitu Siyasah Dzalimah yang diharamkan Syara' dan Siyasah Adilah yang menegaskan kebenaran, menolak berbagai kejahatan, kerusakan dan mewujudkan tujuan Syariat Syara' berkewajiban untuk merujuk pada Siyasah Adilah dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakan kebenaran.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah yaitu:

1. Fiqh Dustury
2. Fiqh Maliy
3. Fiqh Dawly
4. Fiqh Harbiy

Pembedangan fiqh siyasah telah, sedang, dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antara manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam fiqh tersebut berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> H.A Djazulli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2013), h. 28

<sup>34</sup> Irwantoni, *Peran Siyasah Syar'iyah dalam memahami Nas-Nas Agama*” Jurnal AL Adalah, Vol. X No 3 Januari 2012. h. 270.

a. Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara lainnya dalam batas administrasi suatu negara. Dalam fiqh siyasah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashalatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>35</sup>

b. Fiqh Siyasah Maliyyah

Fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Maka dalam fiqh siyasah ada hubungannya di antara tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan miskin. Fiqh siyasah ini membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk sistem parlementer para menteri di pimpin oleh perdana menteri, tugas dari lembaga mengharmoniskan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>36</sup>

c. Fiqh Siyasah Dawliyyah

Dawliyyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, sedangkan Siyasah Dawliyyah sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah teritorial, nasionalitas, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga Negara asing.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 29.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 31.

Selain itu juga mengurus masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum *Dzimi*, *hudud*, dan *qishah*.<sup>37</sup>

d. Fiqh Siyasah Harbiyyah

Siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. Fqih Siyasah Harbiyyah ini meliputi pengertian dari fiqh harbiyyah itu sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian.<sup>38</sup>

## 1. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (Semuanya adalah betul-betul dari Allah). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril, Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Ayat- ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman telita para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui penulisan di tempat terpisah. Al-Qur'an disebar luaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 31.

<sup>38</sup> Dr, Sayuti Palungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, h. 41.

<sup>39</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 334.

Di kalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan pendapat disekitar pengertian Al-quran baik dari segi bahasa maupun istilah, *Asy-syafi'i* misalnya mengatakan bahwa Al-quran bukan berasal dari kata akar kata apapun, dan bukan pula tulisan dengan hamzah. Lafal tersebut sudah lazim di gunakan dalam pengertian *Kalamullah* (Firman Allah) yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu Al-farra berpendapat bahwa lafal Al-quran berasal dari kata *Qarain* jamak dari kata *Qarinab* yang berarti kaitan, karena dilihat dari segi makna dan kandungannya ayat-ayat Al-quran itu sama lain saling berkaitan. Selanjutnya Al-Asy'ari dan para pengikutnya mengatakan bahwa Al-quran di ambil dari akar kata Qarn yang berarti mengabungkan sesuatu atas yang lain, karena surat-surat dan Ayat-ayat Al-quran satu dan lainnya saling bergabung dan berkaitan.<sup>40</sup>

Adapun pengertian Al-quran dari segi istilah dapat dikemukakan berbagai pendapat berikut ini:

*Manna Al-Qatban* secara ringkas mengutip pendapat para ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa Al-quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan niali ibadah bagi yang membacanya. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarqani menurutnya Al-quran adalah lafal yang diturunkan kepada Rasul mulai dari surat Al-fatihah sampai dengan surat An-Nas.<sup>41</sup> Pengertian Al-quran secara lebih lengkap dikemukakan oleh *Abd Al-Wahhad Al-Khallaf* menurutnya Al-

---

<sup>40</sup>Lihat Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Al-quran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h.9.

<sup>41</sup>Manna' Al-Qatban, *MabaSit fi'Ulum Al-Quran*, ( Mesir: Mensyurat al-Ashr al-Hadist, t.t.), h.21.



quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah melalui Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya yang benar agar ia menjadi *Bujjah* bagi Rasul, bahwa ia benar-benar Rasulullah menjadi undang-undang bagi manusia di muka bumi ini, memberikan petunjuk kepada mereka dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Ia terhimpun dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-nash, disampaikan kepada kita secara mutawatir dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tulisan serta terjaga dari perubahan dan pergantian.<sup>42</sup>

Dari berbagai kutipan tersebut kita dapat mengetahui bahwa Al-quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah turunya secara bertahap melalui malaikat jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW, susunannya dimulai dari surat Al-fatihah dan diakhiri dengan surat Al-nash, bagi yang membacanya bernilai ibadah, fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, keberadaannya hingga kini tetap terperihara dengan baik, dan pemuatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan.

Sumber ajaran Agama Islam yang utama Al-quran diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar, keberadaan Al-quran sangat dibutuhkan manusia. Dikalangan *Mu'tazilah* dijumpai pendapat bahwa Tuhan wajib menurunkan Al-quran bagi manusia kerana dengan segala daya yang dimiliki tidak dapat

---

<sup>42</sup>Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Usbul al-Fiqh*, (Jakarta: Al-Majelis al-Ala al-Indonesia al-Da.'wah al-Islamiyah, 1992), h. 23.

memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi. Bagi *Mu'tazilah* Al-quran sebagai konfrimasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran, dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Di dalam Al-quran terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau hadist.<sup>43</sup>

Selanjutnya Al-quran juga berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan mulus, itulah sebabnya ketika umat islam berselisih dalam segala urusannya hendaknya ia berhakim kepada Al-quran, lebih lanjut memerankan fungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Berbagai penyimpanan yang dilakukan Bani Israil terhadap ayat-ayat Allah telah dikoreksi, dalam kaitan inilah di dalam Al-quran di jumpai ayat yang menyatakan celaka bagi orang-orang yang menulis kitabnya dengan tanganya sendiri lalu menyatakan bahwa kitab itu sebagai firman Allah SWT.<sup>44</sup>

#### b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an secara terminologi' hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan al-Arab* (Mengutip pendapat Syammar) hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan

<sup>43</sup>Harun Nasution, *Islamologi Ilmu Kalam*, (Jakarta: UI Press, 1980), h. 80

<sup>44</sup>Muhammad Naqid al-Shadar, *al-Madrasah al-Quraniyah*, (Beirut: Jami' al-Huduq Mahfudzah al-Nasyir, 1981), h. 23.

dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli Usul Fiqh, hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAWA yang bukan berasal dari Al-Quran, pekerjaan, atau ketetapanya. Hadist ini sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW.<sup>45</sup>

c. Hukum Siyasah Menurut Ulama Fiqh

Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan siyasah. Dalam hal ini merekapun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan *syara*". Kesepakatan-kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan Ibn al-Qayyim "Tidak ada siyasah kecuali sesuai dengan syara", akan tetapi kesepakatan bukan tanpa masalah. Masalahnya yang tidak, apakah kemestian penyelenggaraan siyasah syar'iyah sesuai dengan syara, atau berarti kewajiban penyelenggara semangat siyasah syar'iyah atau berarti ke mafhum-an syara.

Dalam mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan kedua alternatif kedua jawaban, tetapi menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan demikian, jawabanya adalah menyesuaikan pelanggaran siyasah syar'iyah dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara secara manthuq suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan siyasah syar'iyah sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam syara secara mafhum. Bertolak dari

---

<sup>45</sup> M.M. Azimi, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), h. 13.

pemahaman bahwa “dunia merupakan ladang akhirat”. Al-Ghazali menyatakan bahwa “agama tidak sempurna kecuali dengan dunia”. Kekuasaan dan agama bersaudara kembar. Agama merupakan asal tujuan, sedangkan sulthan merupakan penjaga. Yang tidak berasal atau beragama akan hancur, dan tidak berpenjaga atau bersulthan akan hilang.

Oleh sebab itu Al-Ghazali menempatkan ilmu syariah khalq sebagai alat. Sebagaimana dikatakannya, “tidak sempurna agama, kecuali dengan kehadiran siyasah khalq”.<sup>46</sup> Lebih lanjut ia berpendapat bahwa seorang ahli Islam (*faqih*) seharusnya berpengetahuan tentang siyasah, sebab menurutnya tidak hanya berperan sebagai sulthan, tetapi juga pembimbing ke arah siyasah khalq. Pada gilirannya iapun berpendapat ilmu fiqh berarti pengetahuan tentang cara-cara perekayasaan dan pengendalian, baginya hukum mempelajarinya adalah *fardhu kifayah*, “Arti pengetahuan siyasah dalam kehidupan umat Islam yang tidak terpisah dari Agama dan Negara. Terlihat dari adanya sejumlah ilmuan Muslim yang tertarik untuk membuat karangan khusus mengenai siyasah, Sebagian pengarang dan karangan yang tercatat hasanah kepustakaan fiqh siyasah”.

Menurut beberapa pendapat ulama dalam berbagai kitab yang dikarangnya tentang fiqh siyasah adalah:

- a. Ali Ibn Ismail tamar pengarang kitab Imamah dan Al Istihqaq

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 11.

- b. Hasyim Bin Al Hakam, pengarang kitab Imamah dan Imamah al Imamah dan al Mahfudz Yaman Ibn Rahab, pengarang kitab Itsbat al Imamah Abu Bakar.<sup>47</sup>
- c. Abu Yusuf, pengarang Al-Kharaj
- d. Al Mawardi, pengarang kitab Al Ahkam Al Sulthaniyyah wa al wilayah Al Diniyyah.<sup>48</sup>

## 2. Pengertian Ulil Amri

Ulil amri adalah sebuah jabatan atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti Republik, Monarki, Federasi, Persekutuan dan bentuk-bentuk lainnya. Penguasa mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Adanya Negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas gelar sukarela.<sup>49</sup>

Rakyat mengangkat kepala negara hukumnya wajib, hal ini bertujuan untuk mengatur masyarakat supaya terbina dengan baik maka dibentuk suatu negara yang berdasarkan Al-Quran maupun sunnah. Bagaimana bila sebuah Negara tanpa pemimpin tidak ada yang di taati, dan tidak ada yang di patuhi karena itu terdapat isyarat memilih seorang ulil amri atau penguasa.

Istilah yang lazim digunakan untuk menunjuk pengertian dalam Al-Quran antara lain adalah *ulil amri*. Hal ini relevan dengan firman Allah (QS. An-Nisa ayat 59) sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Khalifah Babakar al-Hasan, "*Manahij al-Ushuliyyin fi' Dalalah al-Alfaz al-Ahkam*", Qahirah: Maktabah Wahdah, 1989, h. 11.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 13.

<sup>49</sup> Jubair Situmorang, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 160.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>50</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri (pemerintah) diantara kamu.”

Ayat diatas tersebut menerangkan bahwa diwajibkan untuk menaati Allah dalam arti menjalankan semua yang diperintakan kepada kita semua dan meninggalkan larangannya, yang kedua kita harus mentaati Rasulnya karena Allah telah mengutus Rasul kemuka bumi ini yaitu, menjelaskan ayat-ayat Al-quran dan beliau juga sebagai suritauladan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga kita disuruh taat kepada ulil amri (pemimpin), kemudian pemimpin yang bagaimana yang harus kita taati, tidak lain pemimpin yang telah ditentukan Allah dan apabila pemimpin itu melanggar apa yang telah disyariatkan Allah dan berbuat dzalim maka itu tidak boleh taat kepadanya.<sup>50</sup>

Dalam memahami makna ulil amri, dikalangan musafir terjadi variasi interpretasi. Ahmad Mustafa Al-maragh menyatakan, mereka terdiri dari para, hakim, ulama, penglima perang, dan semua pemimon yang terjadi rujukan umat dalam masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum. Muhamad Abduh menjelaskan, mereka adalah *al-ahli wa al-aqdi* yakni orang-orang yang mempunyai pengaruh dimasyarakat, semisal penglima perang, ulama, para pemimpin negara, dan tokoh-tokoh bangsa, para pemikir partai, dan para pelopor kemerdekaan.<sup>51</sup>

<sup>50</sup>Al-Qafari, *Anwar al-Buruq fi' Anwa al-Furuq*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998. H. 444.

<sup>51</sup>Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz VIII, Beirut: Dar Shadir, tt. h. 175.

Berdasarkan pendapat para musafir tersebut diatas dapat dipahami bahwa penguasa atau pemimpin atau *ulil amri* yang menurut bunyi surat An-nisa ayat 59 tersebut, juga wajib ditaati oleh Allah dan Rasul nya. Dalam pemerintah untuk mentaati *ulil amri*, menurut Wahbah Al-Zulaili terdapat isyarat bahwa umat islam wajib hukumnya memilih *ulil amri*.<sup>52</sup> Berdasarkan surah An-nisa ayat 59 di atas, dapat dipahami bahwa seyogyanya jabatan kepala negara itu tidak boleh dibiarkan vakum, meskipun suatu hari sekalipun, sebab bila vakum maka akan mendatangkan bahaya yang besar (*fitanah azimah*).<sup>53</sup>

#### 1. Prinsip-Prinsip Ulil Amri

Didalam Al-Quran terdapat beberapa jumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat seperti dibawah sebagai dasar dan prinsip ajaran islam dan kepemimpinan negara sebagai berikut.<sup>54</sup>

##### a. Prinsip Musyawarah (syuro)

Kata musyawarah menurut istilah fiqh adalah meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 159 yaitu:

---

<sup>52</sup>Shalis bin Abdul Ali Mansur, *Ushul al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah*, Jilid 1, ttp,tp, 1980, h.43

<sup>53</sup> Mular Ibnu Syarif dan Khamami Zalda, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam*, Erlangga, 2008, h. 105.

<sup>54</sup> Munawir Szadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI-Pres, 1993), h. 4.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا  
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “maka karena rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhi diri dari sekelilingmu maka maafkanlah mereka mohonlah ampun bagi mereka dalam urusan ini. Kemudian apabila kamu telah membulatkan yekad maka bertaqwalah kepada Allah. Seseungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”

Dengan petunjuk ini dari ayat diatas, Nabi membudayakan musyawarah dikalangan sahabat, dalam bermusyawarah terkadang Nabi hanya bermusyawarah dengan sebagian sahabat yang ahli dan candikiawan, dan terkadang pula hanya minta pendapat dari salah seorang mereka. Tapi apabila misalnya penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat, beliau menyampaikan dalam pertemuan yang lebih besar mewakili semua golongan.<sup>55</sup>

e. Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin

Merupakan suatu keniscayaan dalam negara, bagi rakyatnya untuk mentaati penguasa. Disini undang-undang politik islam hanya memerintah setiap warga negara untuk mentaati penguasa selama pemerintahannya tidak melanggar syar'iat Islam.

<sup>55</sup> J. Sayuti Palungan, *Prinsip-Prinsip Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 209.

Berdasarkan dengan prinsip ini sangat jelas bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah dianjurkan Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul-nya dan ulil amri (pemerintah) diantara kamu, kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu maka kembalilah kepada ia Allah dan hari kemudian, Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik bagi kesudahannya.”

#### f. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu perintah paling banyak dalam Al-Qur'an, prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh suatu pemimpin dalam pemerintah, apapun bentuk pemerintahan itu. Disini seorang penguasa harus bertindak adil terhadap rakyatnya, sesuai dengan garis-garis besar haluan Islam. Sebagaimana yang dikaitkan Al-Mawardi dalam buku monumentalnya *Al-Ahkam as-hulihaniyah* menjelaskan bila seorang penguasa keluar dari keadilan, maka ia harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang mentaati perintahnya.<sup>56</sup>

Berikut ini Allah Swt berfirman dalam surat An-nisa ayat 58 yang memerintahkan prinsip keadilan yakni sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> M. Sidi Ritaudin, Aspirasi Politik Islam “*Jurnal Tapis Teropong, Fakultas Usuludin Iain Raden Intan Lampung*”, Vol. 1, (2005), h. 63.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia hendak kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”

#### g. Prinsip Kesamaan

Prinsip persamaan maksudnya setiap individu mempunyai hak kebebasan dan kewajiban yang sama, dan ini tidak memandang perbedaan aqidah, nasab, dan lain-lain. Ini terlihat pada suatu ketika seorang wanita tertangkap basah saat mencuri, kemudian para sahabat meminta nabi menerapkan hukum potong tangan. Tetapi Nabi murka dan berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: “Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya pun akan potong tangannya” (H.R. Ahmad).<sup>57</sup>

A.Hasyim dalam bukunya mengatakan bahwa kemerdekaan manusia persamaan hak dalam kehidupan pribadi, sosial dan politik. Baru terjamin apabila masyarakat itu sendiri kuat, sehingga sanggup

<sup>57</sup> Ahmad Bin Hambal, *Musnad Jilid VI*, (Al-Maktub: Al-Islami), 2007, h. 62.

menjalankan asas-asas yang mulia dan sanggup pula mencegah orang jahat-jahat dalam segala kaliber dari tindakan memperkosa hak-hak tersebut”.<sup>58</sup>

Ungkapan tersebut diatas nampaknya sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujarat ayat 13 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal”

Dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang keharusan seorang muslimin untuk menjalankan prinsip persamaan dalam arti luas, tanpa adanya suatu pembatasan atau pengecualian dalam bentuk apapun.

#### h. Prinsip Kebebasan Beragama

Dalam memandang kebebasan atau kemerdekaan ini Islam sangat menjaminy, sebab kebebasan adalah fitrah manusia, sehingga tiap warga negara untuk berfikir, berbuat, berpendapat, selama dalam hal-hal yang tidak melanggar aturan. Hal ini dikarenakan kebebasan merupakan nilai yang paling berharga bagi manusia yang diciptakan

<sup>58</sup> A.Hasyim, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), H. 220.



Allah atas fitrahnya, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256, sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul (tali) yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Kemerdekaan dan kebebasan warga negara untuk berfikir, berbuat, berbicara, dan berpendapat selama dalam hal yang tidak dilarang Al-Qur'an dan sunnah. Sebab kebebasan merupakan nilai yang paling berharga bagi manusia yang diciptakan oleh Allah atas fitrahnya, ini dibuktikan oleh Rasol saat mengutus Muaz Bin Jabal ke Yaman, dimana beliau tidak menyalahkan pendapatnya untuk berjihad.<sup>59</sup>

## 2. Syarat-Syarat Ulil Amri/Penguasa

Dalam Al-Quran dan Sunnah, paling sedikit ditemukan sebelas syarat Ulil Amri dalam islam. Kesebelasan syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Beragama islam
- b. Sudah dewasa

<sup>59</sup>Ahmad Abdurrahim as-Syaih, *Risalah Fi' Ri'ayah al-Mashlahah*, Mesir: ad-Dar al-Mishriyyah al-Lubnaniyyah, 1993. H. 15.

- c. Adil
- d. Pandai menjaga amanah dan profesional
- e. Seorang laki-laki
- f. Kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas
- g. Seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam
- h. Cinta kebenaran
- i. Mampu berkomunikasi dengan baik kepada rakyat, visi, misi, dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan
- j. Cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat, tetapi juga terikat berbagai ajaran dan aturan yang disosialisasikan kepada publik
- k. Keturunan Quraisy, suku asal Nabi Muhammad SAW, syarat ini ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi hanya didapat dalam beberapa hadist.<sup>60</sup>

Mengangkat pemimpin dalam suatu perkumpulan atau organisasi atau masyarakat terlebih dalam sebuah negara itu wajib. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah siapakah yang pantas diangkat menjadi pemimpin dalam organisasi/masyarakat merupakan tanda tanya besar.

---

<sup>60</sup> Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa, Doktrin dan Pemikiran Islam*, (Bandung: Erlangga, 2008), h. 248-263.

Secara teoritis dan idealis Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin negara harus cakap dalam segala sesuatu, hal yang paling penting adalah sikap keteladanan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya memiliki ahlak yang baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin.

Pandangan Al-Qur'an terhadap sistem kepemimpinan negara sangatlah tegas, bahwa landasan pemilihan figur pemimpin negara yang kharismatik, ideal dan berwawasan luas adalah pemimpin yang mematuhi hukum-hukum Allah SWT dan mentaati tuntutan Rosullullah SAW. Jika sistem pemilihan didasarkan sistem demokrasi (*syuro*) yang di ajarkan Al-Qur'an dan pemimpin yang dipilih tersebut adalah pemimpin yang benar-benar mampu, cakap dan terampil, serta integritas kepribadiannya adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka dapat dipastikan ia akan membawa mashlahat dan kemajuan umat.

### **3. Hak dan Kewajiban Ulil Amri/Penguasa**

#### **1. Hak-hak ulil amri/penguasa**

Al-Mawardi menyebutkan ada dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidup dan keluarganya secara patut sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Badrudin az-zarkasyi, *al-Burhan Fi Ulum al-Quran*, juz 1, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1972, h. 213-227

Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat jadi khalifah, Abu Bakar masih pergi kepasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau menafkahi keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih saja berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya diberi gaji 6.000 dirham seratus dan menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500 dirham.<sup>62</sup>

Bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat didalam jumlah yang diberikan Abu Bakar satu hal adalah pasti bahwa kaum muslimin pada waktu itu telah meletakkan suatu prinsip penggajian kepada khalifah. Hak-hak imam ini sebenarnya erat sekali dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu pemimpinnya.

Dhafir Al-Qasimi menyebutkan bahwa hak imam dalam melaksanakan tugas negara yaitu:

- a. Hak mendapatkan penghasilan. Hak ini terang adanya sebab imam telah melakukan pejerjaan demi kemaslahatan umat, sehingga tidak ada lagi waktu baginya memikirkan kepentingan pribadinya. Hal ini jelas sekali jika dilihat dari ukuran sekarang. Meskipun lain masa-masa awal dahulunya, Khalifah Abu Bakar atas desakan dari beberapa sahabat juga mendapatkan penghasilan dari jabatan Khalifahnyanya.

---

<sup>62</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Edisi Kedua, 2003), h. 93-94.

b. Hak mengeluarkan aturan. Seorang imam juga berhak mengeluarkan peraturan yang mengikat Al-Sunnah, dalam mengeluarkan peraturan-peraturan imam mesti mengikuti kaedah-kaedah dalam pedoman-pedoman yang terdapat Nash. Yang terpenting diantaranya ialah musyawarah (*Al-syura*) yakni bahwa dalam mengeluarkan suatu peraturan, tidak boleh bertindak sewenang-wenang ia harus mempertimbangkan peraturan dari para ahli dalam masalah yang bersangkutan. Selain itu juga peraturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan nash dan syara' atau dengan ruh-tasyi' dalam Al-Qur'an dan sunnah.<sup>63</sup>

## 2. Kewajiban-kewajiban Ulil Amri/Penguasa

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus interest*-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri itu datang apabila kewajiban itu tetap dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup diakhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sangat manifestasi dan ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup didunia. Demikian pula dengan kewajiban-kewajiban imam, ternyata tidak ada kesepakatan diantara para ulama terutama dalam perinciannya, sebagai contoh kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:

c. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf.

---

<sup>63</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bogor: Preda Media, 2003). h. 95.

- d. Mentafizdkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan, perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- e. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwa jiwanya dan hartanya.
- f. Menegakan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasan dan kerusakan.
- g. Menjaga tanpa batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- h. Memerangi orang yang menentang Islam setelah melakukan dakwah dengan baik tetapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula mau menjadi kafir.
- i. Memungut shadaqah-shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash dan ijtihad tanpa ragu-ragu
- j. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian oarang-orang yang berhak menerima dari Baitul Mal dengan wajar serta membayarkan pada waktunya.
- k. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara pada mereka, agar pekerjaan dapat di laksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus pleh orang yang jujur.



1. Melaksanakan tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.<sup>64</sup>

Adapun hak lain dari seorang pemimpin adalah Menyebarkan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu keduniawian. Selain itu terdapat kewajiban pemimpin secara umum antara lain:

- a) Taat kepada Allah dan rasulnya bukan kewajiban rakyat tetapin jika kewajiban pemimpin juga .
- b) Mengajak umat beribadah kepada Allah Ta'alla dan memberantas semua bentuk kesyirikan dan sarannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rosullah SAW dan khulafa Rasyidin sesudahnya.
- c) Berbuat adil, sebagaimana di jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yaitu:


  
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
   
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
   
 سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian, sesungguhnya Allah adalah maha Mendengar lagi maha melihat”

---

<sup>64</sup> H.A, Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Bandung: Edisi Kedua,2003), h. 95.

- d) Melaksanakan hukum Allah, pemimpin utama adalah Allah sedangkan pemimpin manusai ialah Ulil Amri, dia bertugas melaksanakan hukum Allah dan menyuruh manusia agar berhukum dengan hukumnya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 114:

أَفْغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

Artinya:”Maka patuhlah aku mencari hakim selain dari pada Allah, padahal dialah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan terperinci”.

- e) Menasehati masyarakatnya, pemimpin berkewajiban menasehati masyarakatnya agar kembali kejalan yang benar untuk memperoleh maslahat dunia dan akhiratnya. Rakyat aka mudah taat kepada pemimpinnya dan hendaknya pemimpin menunaikan amanat, karena orang taat kepada Allah akan disegani oleh umat.

Yang terpenting Ulil Amri harus menjaga hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *Kasb al-halal*, hak beragama, dan lain-lain.<sup>65</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Rakyat

Rakyat terdiri dari muslim dan nonmuslim, yang nonmuslim ini ada yang disebut kafir dzimi dan ada juga disebut musta'min. Kafir dzimi adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak

<sup>65</sup> <http://amaliahgoresan.blogspot.co.id>, *kepemimpinan dalam islam*, Akses 12 Maret.

boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedangkan mustamin adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan musta'min tidak memiliki hak-hak politik karena mereka itu orang asing persamaanya, kedua-duanya adalah non muslim.<sup>66</sup> Adapun hak-hak rakyat adalah:

- a. Hak persamaan (Al-Musawat)
- b. Hak kebebasan (Al-Hurriyat)
- c. Hak menurut ilmu/mendapatkan pengajaran
- d. Hak memperoleh ranggungan dari negara (Al-Kafalat).<sup>67</sup>

Umar bin Khathab pernah menulis kepada Abu Musa Al-Asy'ariy “ samakan lah setiap manusia didalam majelis-majelismu, dihadapanmu, wajahmu, dan dalam pengadilan-pengadilanmu, sehingga orang yang kedudukannya tidak menjadi berharap atas kepihakanmu, sementara orang yang lemah tidak putus asa atas kehadiranmu.”

Selain itu adapun hak rakyat secara umum antara lain:

- a. Warga negara harus diberi semua hak yang telah ditetapkan dalam hukum islam kepada mereka. Yaitu bahwa merekakan dijamin, dengan batas-batas hukum tersebut, keamanan hidupnya secara penuh , kekayaan dan kehormatannya, kemerdekaan beragamanya, kemerdekaan ibadahnya, kemerdekaan orangnya, kemerdekaan

---

<sup>66</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Edisi Kedua), h. 98.

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 99.

mengeluarkan pendapatnya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, keleluasaan bergerakaknya, kemerdekaan bekerjanya, kesamaan pendapat dan haknya untuk mendapatkan pelayanan umum.<sup>68</sup>

- b. Kapanpun juga, tidak ada seorang warga negara yang lebih dirampas semua haknya kecuali dibawah hukum. Tidak ada seorangpun yang warga negara yang akan divonis karena satu dakwaan tanpa sepenuhnya diberi hak untuk membela diri dan tanpa keputusan pengadilan yang sah.
- c. Semua mazhab pemikiran muslim yang diakui, didalam batas-batas hukum, akan memiliki kemerdekaan agama sepenuhnya. Semua berhak menyebar luaskan segala perintah agama kepada penganutnya dan berhak mempropoganda pandangan-pandangan mereka. Masalah-masalah yang berada dibawah lingkup hukum pribadi mereka sejalan dngna aturan agama, adat istiadat tradisinya masing-masing.
- d. Para warga nonmuslim, dalam batas-batasan hukumakan memiliki kemerdekaan beragama dan beribadah sepenuhnya, kemerdekaan menganut cara hidup, kebudayaan dan pendidikan agama.
- e. Semua kewajiban yang diemban Negara, dalam batas-batasan hukum atas warga negara non muslim akan sepenuhnya dihormati, meraka akan mendapatkan seama dengan warga negara muslim untuk memperoleh hak –hak kewarganegaraan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Mustafa Zaid, *al-Mashlahah Fi' at-Tasyri' al-Islami wa Najm ad-Din ath-Thufi'*, Mesir Dar al-Fikr al-Arabi', Mishr, 1964, h.23

<sup>69</sup> Artikel, Kriteria, *Kewajiban Rakyat Dalam Fiqh Siyasa*, (On-line), tersedia di, <http://amaliahgoresan.blogspot.co.id>. (30 Januari 2020).

Dari uraian diatas tanpa bahwa masalah hakini adalah masalah ijtihadiah. Hanya yang penting, hak itu berimbalan pada kewajiban. Oleh karena itu apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari maqasidu syari'ah, maka hak rakyat pun tidak lepas dari maqasidu syari'ah dalam arti yang seluas-luasnya.

Hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi seacara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu dan berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama. Disini tampak kembali bahwa *focus interest* adalah kewajiban.apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik berarti bahwa masing-masing dikorbankan, akan tetapi justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pilih lain. *Imam* yang melaksanakan kewajibankewajiban dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajiban berarti pila memenuhi hak si *imam*.<sup>70</sup>

## 5. Hubungan Penguasa dan Rakyat

Manusia terfitrah sebagai mahluk sosial. Meraka saling bergantung satu dengan yang lainnya, Allah SWT menciptakan mereka dari laki-laki dan perempuan lantas menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, seperti yang terkandung dalam fiman Allah dalam surat Al-Hujaat ayat 13 sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> H.A Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bogor. Prenada Media, 2003) h. 64.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal.”

Manakala menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bersuku-suku secara sunnahtullah manusia membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengurus berbagai problem yang dihadapi. Itulah manusia ma'luq Allah *Subhanahu wata'ala* yang mendapatkan kepercayaan dari nya untuk memakmurkan bumi ini, seperti terkandung dalam firman Allah dalam Surat Al-Isra ayat 70 sebagai berikut.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَلَدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratandan di lautan, kami memberi mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan”.

Sementara dalam sitem pemerintahan Islam, Khalifah, Kepala Negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya



dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran Sholat berjamaah. Imam dipilih untuk memimpin sholat berjamaah adalah orang-orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashah* maupun ketaqwaan dari yang lainnya. Dalam sholat tersebut, imam berdiri memimpin Shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum mengetahui gerak-gerik imam seandainya imam keliru dalam Shalat, amak makmum dapat melakukan koreksi terhadap nya tanpa mengganggu dan merusak Sholat itu sendiri.<sup>71</sup>

Ini mengisyaratkan bahwa, kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya, ia harus dapat mendengar dan menyauti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu kepala Negara harus bisa menerima masukan dari rakyatnya. Kepala Negara atau imam tidak seperti pandangan dalam Syi'ah Isma'liyyah dan Imamah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.<sup>72</sup>

Dua contoh diatas menunjukan bahwa kepala Negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memberlakukan kepala negara tidak berbeda dengan manusia lainnya. Ia memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dalam

---

<sup>71</sup>Zuhraini, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic) Terhadap Negara Hukum Pancasila" Jurnal Al-Adalah, Vol X. No.17 february. 2014.h. 182.

<sup>72</sup>Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta. Predana Media, 2014), h. 241.

masyarakat hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat.<sup>73</sup>

Orientasi Bernard menyebutkan tugas dan kewajiban kepala Negara meliputi hal-hal yang mengenai kemaslahatan umat, yaitu membela kepentingan masyarakat, melindungi mereka dari serangan-serangan musuh dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk memilik kehidupan yang didunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya apabila kepala negara telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kepala negara juga memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya.<sup>74</sup>

Menurut Al-Mawardi hak kepala negara atas rakyatnya ada dua jenis yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala Negara menjalankan pemerintahannya dengan baik. Dalam hal pertama kepatuhan dan kataatan bukanlah hal yang mutlak. Kepala negara hanya dipatuhi dan ditaati selama ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar sesuai ajaran Islam dan tidak memerintah hal- hal bertentangan dengan Islam.<sup>75</sup> Kalau syarat demikian tidak dipenuhi, maka rakyat wajib memenuhinya. Itulah sebabnya dalam hal yang kedua rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala Negara dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasehat kepada kepala Negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik maka rakyat akan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 242.

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 243.

<sup>75</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2 Tahun 2017. H. 24.

mentaati dan mematuhi pemimpin tersebut, maka akan timbullah hubungan timbal balik yang baik antara pemimpin dan rakyatnya.<sup>76</sup>

Dalam pandangan Islam dan AL-Qur'an, rakyat merupakan salah satu pilar asasi yang mendasar bagi sebuah pemerintahan, dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al- Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ  
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “sesungguhnya kami telah mengutus rasul- rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan kami telah turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-nya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa.”

Oleh karena itu hubungan rakyat dan pemerintahan dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut.

1. Memilih sistem pemerintahan islam atas saran rakyat yaitu, dalam pemerintahan Islam, rakyat dengan kesadaran yang memilih sistem undang-undang Islam dan menghendaki undang-undang ilahi yang ditetapkan. Pada dasarnya tanpa ada nya pilihan dan dukungan rakyat, pemerintah Islam tidak mungkin dapat diterapkan.<sup>77</sup>
2. Pemilihan aparatur negara oleh rakyat yaitu, dalam pemerintahan Islam, penentuan badan pelaksana sistem (pemimpin tertinggi, presiden/, para

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 245.

<sup>77</sup> Abdurrahman, *Mukjizat Al-quran Dalam Berbagai Aspeknya*, Jurnal Pusaka Media Kajian dan Pemikiran Islam, Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, 2016.

wakil rakyat dan lainnya) dilakukan oleh rakyat, yang mana sebagian dari pemilihan-pemilihan secara langsung dan tidak langsung. Rakyat secara langsung memilih presiden, pada wakil syura dan para wakil daerah dan mereka memiliki peran secara tidak langsung dalam pemilihan tertinggi revolusi melalui dewan pakar yang tertulis.<sup>78</sup>

3. Musyawarah seorang hakim Islam dengan rakyat yaitu. Hal yang mesti dilakukan oleh seorang hakim (penguasa) adalah mengetahui pandangan-pandangan rakyat dengan bermusyawarah mengatur urusan masyarakat dengan musyawarah dengan mereka, namun pada akhirnya keputusan terakhir tetap dipegang oleh hakim, dalam hal ini rakyat tidak memiliki hak untuk protes walaupun hal tersebut bertentangan dengan pandangan rakyat.
4. Ikut andil dalam menetapkan undang-undang yaitu, rakyat, dalam pemerintahan Islam sebagai staf perundang-undangan negara memiliki saham dalam meretifikasi aturan-aturan asas penentuan undang-undang dasar adalah fondasi utama pengaturan negara yang dengan vara pemungutan suara.
5. Pengawasan rakyat atas penguasa yaitu, rakyat secara langsung mengawasi seluruh tingkah laku penguasa, sejak rakyat menggunakan media kontrol terhadap para penguasa dalam menjalankan perannya dalam pemerintahan dan mencegah terjadinya penyelewengan dan menhkritik perbuatan dan agenda-agenda negara.

---

<sup>78</sup>Abdul Malik Ghazali, "Aborsi antara Hukum dan Delima Perempuan", Jurnal Al-Adalah, Vol 9 No. 01, Juni 2014. h. 201.

6. Peran masyarakat dalam mendukung dan bekerja sama dengan negara yaitu, Pemerintahan Islam sebagaimana dalam pembentukannya membutuhkan baiat setiap rakyat, dan kerja sama masyarakat dapat menjaga pemerintahan ini dari serangan para musuh baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
7. Negara Islam adalah abdi rakyat yaitu, dalam pandangan islam pemerintah dan negara islam adalah sebagai sebuah sarana untuk menerapkan perintah-perintah tuhan. Diantaranya adalah menetapkan aturan-aturan dan menciptakan keamanan didalam dan diluar negara memberantas kezaliman dan ketidakadilan dan lain-lain.<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa penguasa dan rakyat sangat berhubungan dan berkaitan karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan, apabila kedua-duanya telah dilaksanakan maka akan terbentuklah negara yang rukun, adil dan sejahtera.

## **B. Penambangan Pasir Laut**

Penambangan pasir laut merupakan suatu cara atau proses kegiatan pengambilan yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan pasir dengan cara mengali sungai dan laut sehingga menimbulkan dampak yang luas bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya, yang mana sebagai sumber kemakmuran yang tidak diragukan lagi, bahwa sektor ini menyokong pendapatan masyarakat.

---

<sup>79</sup>Hubungan Penguasa Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam” (On-line), tersedia di, <http://www.islamquestneett.co.id> (31 januari 2020).

Pasir Laut merupakan salah satu sumber daya alam non hayati apabila dikelola dengan baik, memiliki prospek dimasa mendatang untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolannya harus dilakukan secara tertib dan tanggung jawab. Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan dan perdagangan pasir laut selama ini tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan keterpurukan nelayan akibat dampak dari terganggunya ekosistem diwilayah tangkap pesisir. Agar penambangan pasir laut dapat dilakukan secara baik dan benar serta menghindari terjadinya penyimpangan meusak lingkungan hidup, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusaha pasir laut.<sup>80</sup>

#### 1. Tujuan dan Fungsi Penambangan pasir

Fungsi pasir adalah suatu bahan material yang digunakan sebagai bahan bangunan untuk merekatkan semen, selain itu juga menjadi bahan utama untuk membuat batako serta batu bata. Lebih jauh lagi mengenai fungsi akan bergantung pada jenis pasir yang digunakan tak hanya jenis pasir saja yang menjadi penentu dari fungsi agregat material bangunan ini sendiri.

Aktivitas penambangan pasir laut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan karena tuntutan ekonomi, maka masyarakat tetap melakukan aktivitas penambangan pasir laut. Pemanfaatan sumberdaya alam pesisir

---

<sup>80</sup>Soho Pancoran “*pertambangan-pertambangan*” (On-line), Tersedia di, <http://www.forplid.net/studi-kasus/7> (01 February 2020).



yang tidak berkelanjutan berupa penambangan pasir yang menimbulkan dampak kerusakan terhadap wilayah pesisir, kerusakan terhadap ekosistem pesisir pantai ancaman abrasi dan banjir tidak dapat dihindari dengan dalih kegiatan penambangan lebih banyak tujuan manfaatnya berupa penyediaan bahan baku bangunan dan pembuatan batako yang menggunakan bahan baku pasir laut, serta pembangunan rumah-rumah pemukiman, gedung-gedung yang pembangunannya menggunakan pasir laut.<sup>81</sup>

## 2. Jenis Penambangan Pasir

Pasir adalah contoh bahan material butiran, butiran pasir pada umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentukan pasir adalah silikon dioksida tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila dicampur dengan semen.<sup>82</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pasir adalah lapisan tanah atau timbunan kerikil halus. Pasir tanah adalah pasir yang bahannya berasal dari tanah yang diambil dengan cara digali serta penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah. Penggalian yang melebihi batas dapat menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau

---

<sup>81</sup>Rahardiawan, “*Kompilasi Data Geologi Dasar Laut Regional*” (On-line), tersedia di, <http://mgi.esdm.go.id> (03 February 2020).

<sup>82</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih.2009,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang.Cv.Widya Karya, 2014) , h.362.

bahaya terhadap tanah milik lainnya maka penggalian harus segera di hentikan, walaupun penggalian belum mencapai 1,5 meter.<sup>83</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan pemerintah NO. 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian, pasir termasuk golongan c dan kegunaan pasir bisa dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Pasir beton, untuk jenis pasir ini terdapat karekteristik dan sifat pasir yang khusus yakni warnanya yang abu-abu gelap hingga kehitaman, selain itu juga jenis pasir ini memiliki tingkatan kehalusan tinggi. Ciri khas dari jenis pasir beton ini adalah pada saat digenggam, pasir tidak membentuk gumpalan dan akan kembali buyar, karekteristik pasir dengan butiran yang halus sangat cocok digunakan untuk menguatkan dan merekatkan material bangunan lain, untuk pasir beton memang menjadi salah satu agregat penting untuk merekatkan batu bata dan juga batu, memplester dinding rumah pengecoran dinding dan fondasi bangunan, teksturnya yang halus membuat hasil plesteran dengan jenis pasir ini lebih halus, selain itu pasir beton seringkali digunakan sebagai material agregat halus dalam beton precast.
2. Pasir pasang karekteristik dan sifatnya bila di pegang pasir jenis ini akan terasa jauh lebih halus dari pada pasir beton, selain karekteristik butiran dengan ukuran agregat yang lebih halus, pasir pasang ini pun memiliki elemen yang lebih padat, karena itu ketika menggenggam pasir ini dan mengepalkan tidak akan hancur alias tetap

---

<sup>83</sup>*Ibid.h.363.*

akan gumpal. Fungsi pasir pasang dengan karakteristik jenis pasir ini mudah mengumpal namun memiliki karakter yang halus menjadikan pasir pasang cocok dipadukan dengan pasir beton, kedua jenis pasir ini cocok untuk membuat pondasi lebih kuat serta hasil plasteran dinding lebih luas berkat butirannya yang lebih kecil.

3. Pasir merah (jebrod) seperti namanya warna pasir ini memang berwarna merah atau ke orangean, pasir ini kerap kali disebut dengan pasir jebrod salah satu alasannya karena berasal dari jenrod cianjur meskipun ada juga yang berasal dari sukabumi jawa barat, jenis pasir ini kasar dengan butiran yang besar bila digumpalkan pasir ini tidak akan berubah bentuk dan hancur. Karakter pasir merah namun memiliki partikel yang kecil dan erat yang menjadikan pasir ini cocok untuk menambah daya rekat bangunan, untuk pasir merah kerap kali digunakan untuk pengecoran bersama dengan pasir beton, beberapa contoh produk Asiacon yang menggunakan material ini seperti pembuatan paving block, grass block, tutup u-ditch dan tiang pancang beton.

4. Pasir elod karakteristik dan sifat pasir ini ada beberapa hal yang menjadikan pasir ini akan terasa berbeda dengan jenis pasir lain yang ada di atas, pertama dari warna. Warna jenis pasir ini hitam kelam meskipun ada yang berwarna abu-abu gelap. Asal warna gelap tersebut disebabkan karena pada pasir masih terdapat kandungan tanah sehingga terasa ketika digenggam, selain itu juga pasir elod memiliki

butiran yang kecil dan halus, butirannya lebih halus dari pasir pasang dan pasir beton. Pasir elod tidak bisa digunakan untuk material bangunan karena terdapat kandungan tanah di dalamnya, sebaiknya jenis pasir jadi bahan utama membuat batako meskipun ada juga yang mencampur jenis pasir ini dengan pasir beton sebagai plesteran dinding.

5. Pasir sungai ini memiliki jenis pasir yang berasal dari sungai dan ukuran butiran yang tidak terlalu besar maupun kecil, ukuran butiran agregat pasir ini antara 0,063mm hingga 5mm. Pasir sungai diambil langsung dari sungai dan biasanya merupakan hasil kikisan dari bebatuan sungai yang keras serta tajam, tak heran bila jenis pasir ini juga dipercaya kuat. Fungsi pasir sungai ini digunakan untuk campuran pengecoran dan juga fondasi rumah, pasir ini dipercaya sebagian orang untuk pondasi lebih kuat dan tahan lama.<sup>84</sup>

### C. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku, jurnal, skripsi yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Dampak Penambangan Pasir di Sungai Luk Ulo Terhadap Lingkungan” yang ditulis oleh, Farida Muniroh, jurusan Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta 2016, hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak dari penambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan di sungai Luk Ulo

---

<sup>84</sup>Sirojul Munir. “jenis beda pasir berdasarkan kegunaannya”. ( On-line) tersedia di :<http://idebangunan.blogspot.com/2018/06/12.htm> (5 juni 2020).

Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, (1) Kerusakan lahan pada pertanian yang mengakibatkan penurunan luas lahan sawah dan kering pada tahun 2015-2016, longsornya lahan sawah disekitar bantaran sungai dan tanah pertanian tandus, (2) kerusakan bangunan pada fasilitas umum berupa jalan kecamatan, jembatan yang menghubungkan Desa Banioro dan Desa langse.

2. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar” yang ditulis oleh Dhiahurahmah, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2018, hasil dari penelitian ini adalah pengaruh pertambangan pasir terhadap pemukiman masyarakat desa ujung baji, kegiatan penambangan berpengaruh sangat kuat terhadap luas kawasan pemukiman, kegiatan pertambangan berpengaruh rendah terhadap jumlah sarana umum, kegiatan tambang berpengaruh sangat kuat terhadap panjang serta kondisi jalan.
3. Skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam” yang ditulis oleh Sri Widiyani, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro 2017, hasil dari penelitian ini bahwa dampak dari kegiatan penambangan pasir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang serta ada yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, kegiatan

penambangan tersebut menimbulkan dampak lingkungan seperti dampak lingkungan biotik dan lingkungan abiotik serta menimbulkan dampak positif dan negatif.

Perbedaan dengan skripsi yang di buat oleh penulis dalam hal ini adalah pada skripsi pertamaa penulis lebih fokus pada dampak dari penambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan di sungai Luk Ulo Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, pada skripsi kedua penulis melakukan kegiatan penambangan berpengaruh sangat kuat terhadap luas kawasan pemukiman, kegiatan pertambangan berpengaruh rendah terhadap jumlah sarana umum, kegiatan tambang berpengaruh sangat kuat terhadap panjang serta kondisi jalan, dan pada skripsi yang ketiga penulis meneliti kegiatan penambangan pasir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang serta ada yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, kegiatan penambangan tersebut menimbulkan dampak lingkungan seperti dampak lingkungan biotik dan lingkungan abiotik serta menimbulkan dampak positif dan negatif.

Sedangkan pada skripsi yang dibuat oleh penulis kali ini lebih fokus penulis kedalam kebijakan dan pengawasan di lokasi pertambangan pasir laut, pemerintahan daerah Pesisir Barat selaku yang berwenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat berhak mengatur atau mengurus sepenuhnya yang berlandaskan Peraturan Daerah Pesisir Barat

(PERDA NO 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat).





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A'la al-maududi, Sayyid, Abdul, *The Islamic Law and Constitution*, translated and edited by khurshid Ahmad MA. LLB. Islamic Publications Ltd. 13-E Shah Alam Market, Lahore, Pakistan, 1967.

Ahmad Abdurrahim as-Syaih, *Risalah Fi' Ri'ayah al-Mashlahah*, Mesir: ad-Dar al-Mishriyyah al-Lubnaniyyah, 1993. H. 15.

Amiruddin, Zainal Asikan, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Ari kumto, Suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Amiruddin, Zainal Asikan, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Azimi, M.M, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.

Badrudin, az-zarkasyi, *al-Burhan Fi Ulum al-Quran*, juz 1, Beirut: Dar al-Ma'arifah, 1972, h. 213-227

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-4 Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya 30 juz*, Solo: Qomari Prima Publishther, 2007.

Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: cetakan ke-4, Kencana, 2009.

Djambat, Syaipan, *Metodologi Penelitian*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.

Hasan Binjai, Abdul Halim *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hasyim, A, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Hambal, Bin Ahmad *Musnad Jilid VI*, Al-Maktub Al-Islami, T.T.

HS, Salim, *Hukum pertambangan mineral dan batubara*, Jakarta: sinar grafika, 2014.

Iqbal, Muhammad Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta. Predana Media, 2014.

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004.

Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2014.

kartono, Kartini, *pengantar metodologi social*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Mujar Ibnu, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, Doktrin dan Pemikiran Islam, Erlangga, 2008.

Manzhur Ibn, *lisan al-Arab, juz 6, Beirut*: Dar al-shadr, 1968.

Khalifah Babakar al-Hasan, “*Manahij al-Ushuliyin fi’ Dalalah al-Alfaz al-Ahkam*”, Qahirah: Maktabah Wahdah, 1989, h. 11.

Mustafa Zaid, “*al-Mashlahah Fi’ at-Tasyri’ al-Islami wa Najm ad-Din ath-Thufi*”, Mesir Dar al-Fikr al-Arabi’, Mishr, 1964, h.23

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zalda, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam*, Erlangga, 2008.

Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Palungan, Sayuti, M.A, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, 2008.

Palungan, Sayuti, *Prinsip-Prinsip Piagam Madinah ditinjau dari pandngan Al-Quran* , Jakarta: Raja Grapind0 Persada, 1996.

Pitana, I Gede, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009.

Rahmat, Jalaludin, *Meteodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.

Rahardiawan, R, *Kompilasi Data Geologi Dasar Laut Regional*. 2011.

Shalis bin Abdul Ali Mansur, *Ushul al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah*, Jilid 1, ttp,tp, 1980, h.43

Safri, Burhanudin, *Sejarah Maritim Indonesia*, Jakarta: Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Non Hayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 2003, h. 1.

Situmorang, Jubair, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Supramono, Gatot, *hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka cipta, 2012.

Suvbago, Joko, *metode penelitian dalam teori dan praktik*, Jakarta: PT .Rinneka cipta, 1994.

Susiadi, *metode penelitian*, lampung: pusat penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Afabeta, 2011.

Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang.Cv.Widya Karya, 2009.

Szadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI-Pres, 1993.

Wahab, Abd, al-Khalaf, *Al-Siyasah Wa al-Syariah*, Kairo: Dar Anshor, 1997.

### **Wawancara**

Ade saputra, wawancara dengan pembongkar muat pasir, secara langsung, 27 Februari 2020.

Agus fahri, wawancara dengan pengelola tambang pasir, secara langsung dilokasi pertambangan, 03 Maret 2020.

Hidayat Mizwar, wawancara dengan masyarakat umum, secara langsung, 05 Maret 2020.

Munadi Mz, wawancara dengan sopir mobil pengangkut pasir, Melalui Telponan, 12 Oktober 2019.

Muhklazim, S.Pd..MM, wawancara dengan sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan bertatap muka langsung, 03 Maret 2020.

Nurkholis, wawancara dengan kepala desa pekon mandiri sejati, tatap muka 06 Maret 2020.

### **Jurnal**

A'la al-maududi, Sayyid, Abdul, *The Islamic Law and Constitution*, translated and edited by khurshid Ahmad MA. LLB. Islamic Publications Ltd. 13-E Shah Alam Market, Lahore, Pakistan, 1967.

Ahmad bin Hamdal, Al-maktub Al-Islam, *Musnad jilid VI*, Vol.2 No.62, 2009.

Al-Qafari, *Anwar al-Buruq fi' Anwa al-Furuq'*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998. H. 444.

Abdul Malik Ghazali, "Aborsi antara Hukum dan Delima Perempuan", Jurnal Al-Adalah, Vol 9 No. 01, Juni 2014. h. 201.

Abdurrahman, *Mukjizat Al-quran Dalam Berbagai Aspeknya*, Jurnal Pusaka Media Kajian dan Pemikiran Islam, Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, 2016

Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2 Tahun 2017. H. 24.

Irwantoni, "Peran Siyasah Syar'iyah dalam Memahami Nas-Nas Agama" Jurnal AL-Adalah, Vol. X No 3 Januari 2012. h. 270.

M.Sidi Ritaudin, Jurnal Tapis Teropong Aspirasi Politik Islam, *Fakultas Usuludin Iain Raden Lampung*, Vol. 1 No.63, 2005.

Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz VIII, Beirut: Dar Shadir, tt. h. 175.

Zuhraeni, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic) Terhadap Negara Hukum Pancasila" Jurnal Al-Adalah, Vol X. No.17 february. 2014.h. 182.

### Sumber On-line

Amaliah. *Kriteria dan Kewajiban Rakyat Dalam Fiqh Siyasah*, (On-line), tersedia di :<http://amaliahgoresan.blogspot.co.id>. (30 Januari 2020).

*Hubungan Penguasa Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam*", (On-line), tersedia di :<http://www.islamquestneett.co.id>, (31 januari 2020).

Kementrian kelautan dan Perikanan. "Pengelolaan laut", (On-line), tersedia di : <http://kkp.go.id/djprl/page/94.htm>. (7 february 2020).

"Pertambangan pertambangan" (On-line), tersedia di :<http://www.forplid.net/studi-kasus/7.html>. (8 Februari 2020).

"Jenis Benda Pasir Berdasarkan Kegunaannya" (On-line) tersedia di :[Http://idebangunan.blogspot.com/2018/06/Html](http://idebangunan.blogspot.com/2018/06/Html), (5 juni 2020).

"Kepemimpinan dalam Islam" (On-line), tersedia di : <http://amaliahgoresan.blogspot.co.id> (7 Februari 2020).